



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOJONEGORO**

JALAN TRUNOJOYO NO.12 TELEPON (0353) 893526

WEBSITE : BAKESBANGPOL.BOJONEGORO.AC.ID E-MAIL : BAKESBANGPOL@BOJONEGOROKAB.GO.ID

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOJONEGORO



Kesbangpolbojonegoro



kesbangpol.bojonegoro.7



akesbangpolbojo1



Bakesbangpol Bojonegoro



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra PD 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah 26

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 33

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 35

4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024 35

BAB V PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2022 7

Tabel 2.2. Hasil Capaian Renstra Tahun 2022 8

Tabel 2.3. Anggaran dan Tingkat Realisasinya Tahun 2022 9

Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023..... 14

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bojonegoro Tahun 202120

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bojonegoro Tahun 202223

Tabel 2.7 Review terhadap Ranwal RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.....27

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah34

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024.....42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan Rancangan dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 merupakan penjabaran dari perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024–2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam

penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terAwal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 12) Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Rancangan Perubahan Renja;
- 13) Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, DimutAwalkan dengan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutAwalan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Tahun 2019-2023;
- 16) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.
- 17) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- 19) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;
- 20) Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/549/KEP/412.013/2021 tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun kedepan agar terarah, efektif, efisies, terpadu dan

terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**
- **Daftar Isi**

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

II. HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro

Berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (Tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022), mengacu pada APBD Tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisi uraian mengenai :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Berisi uraian mengenai :

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan rumusan program dan kegiatan.

IV. RANCANGAN RENCANA KERJA PENDANAAN PD

Berisi tentang penjelasan atas adanya ketidaksesuaian rumusan program dan kegiatan dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

V. PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 meliputi kebijakan perencanaan program, kegiatan dan pelaksanaan rencana program, kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 11.231.050.910,-. Namun dalam tahun berjalan, untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro, anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro dilakukan penyesuaian anggaran pada P-APBD menjadi Rp. 11.432.359.779,-. Namun pada dasarnya kegiatan prioritas di Tahun 2022 mampu terlaksana dengan baik.

Hasil Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada Capaian Renstra Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang aman,	Indeks Kesetaraan (Sikap & Harapan	80,5	81,71	101,49	Sangat Tinggi

	nyaman dan tertib berlandaskan nilai-nilai relegius dan kearifan budaya lokal	Pemerintah)				
		Indeks Kerjasama	78,1	77,64	99,41	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 2.1. diatas maka tingkat capaian target sasaran RPJMD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 untuk indikator Indeks Kesetaraan (Sikap & Harapan Pemerintah) adalah 101,49% dengan kategori capaian **Sangat tinggi**, sedangkan tingkat capaian target sasaran RPJMD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 untuk indikator Indeks Kerjasama adalah 99,41 % dengan kategori capaian **Sangat tinggi**.

Tabel. 2.2.
Hasil Capaian Renstra Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
			Renstra 2022			
1.	Meningkatnya kewaspadaan dan cegah dini konflik sosial	Persentase tingkat efektifitas deteksi dini	87%	100%	115	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya sinergitas dengan Ormas, LSM, dan Instansi Pemerintah	Persentase Ormas dan LSM yang aktif dan terdaftar sesuai ketentuan	85%	86%	101	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 2.2. diatas dapat diketahui capaian indikator Sasaran RPJMD sebagai berikut :

- Indikator kinerja persentase tingkat efektifitas deteksi dini dengan tingkat capaian sebesar 115% dengan kategori capaian **sangat tinggi**.
 Dengan hasil kinerja : potensi yang berhasil dicegah sebanyak 9 potensi dari jumlah potensi konflik yang terdeteksi sebanyak 9 potensi.
- Indikator Kinerja persentase ormas dan LSM yang aktif dan terdaftar sesuai ketentuan dengan tingkat capaian sebesar 101% dengan kategori capaian **sangat tinggi**.
 Dengan hasil kinerja : Ormas, LSM aktif dan berbadan hukum sebanyak 147 Ormas dari jumlah Ormas, LSM yang terdata sebanyak 170 Ormas.

Tabel 2.3.

Anggaran dan Tingkat Realisasinya Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PELAKSANAAN		
		PAGU DALAM P-APBD 2022 (RP.)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI KEGIATAN (%)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.370.068.391	80,97	100,00
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.165.000	65,81	100,00
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.183.754.091	79,50	100,00
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.396.000	98,09	100,00
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.728.500	89,91	100,00
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.584.800	95,14	100,00
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.349.360	93,62	100,00
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.090.640	82,44	100,00
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.370.431.000	96,27	92,00
	1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.370.431.000	96,27	92,00
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	676.261.088	66,40	97,00
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	676.261.088	66,40	97,00
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	203.558.000	10,20	90,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PELAKSANAAN		
		PAGU DALAM P-APBD 2022 (RP.)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI KEGIATAN (%)
1	2	3	4	5
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	203.558.000	10,20	90,00
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	79.302.000	36,29	70
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	79.302.000	36,29	70
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	732.739.300	91,12	112,5
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	732.739.300	91,12	112,5
	JUMLAH	11.432.359.779	85,04	96,40

Dari tabel Hasil Capaian Renja dan Renstra Tahun 2022, kami uraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk seminar-seminar diantaranya :

- Terlaksananya Kegiatan seminar pendidikan politik pilih pemula dikalangan pelajar SMA/SMK kelas XI se Kabupaten Bojonegoro.
- Terlaksananya Kegiatan seminar pendidikan politik bagi pilih pemula (political education for first voters) di kalangan pelajar SMA/SMK kelas XI wilayah timur dan barat.
- Terlaksananya Kegiatan sosialisasi pemilu bagi tokoh masyarakat dan generasi pemuda.
- Kegiatan seminar pengembangan demokratisasi dan penerapan etika budaya politik bagi masyarakat dalam mendukung TMMD.
- Kegiatan sosialisasi pemilu bagi tokoh masyarakat dan generasi pemuda.
- Kegiatan Gaspol (Gagasan Politik) dalam bentuk sosialisasi pemilu bagi masyarakat serta pemantauan perkembangan situasi politik di Kabupaten Bojonegoro.

Realisasi Anggaran setelah P-APBD :

Pagu APBD	Pagu P-APBD	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran
1	2	3	4	4 = (2 – 3)
4.273.489.000	4.370.431.000	4.207.527.770	96,27	162.903.230

- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk seminar dan forum group discussion (FGD) diantaranya :

- Terlaksananya Kegiatan fasilitasi pemberdayaan ormas perempuan
- Terlaksananya fasilitasi organisasi kemasyarakatan yang belum ber-SKT/terdaftar untuk berlegalitas hukum
- Terlaksananya Tim pengawasan ormas terpadu.

Realisasi Anggaran setelah P-APBD :

Pagu APBD	Pagu P-APBD	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran
1	2	3	4	4 = (2 – 3)
325.425.500	676.261.088	449.042.876	66,40	227.218.212

- 4) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk seminar dan sarasehan diantaranya :

- Terlaksananya kegiatan seminar kebangsaan dengan hasil kegiatan menjalin silaturahmi antara pemerintah kabupaten dan memperkuat rasa nasionalisme dan jiwa kebangsaan di kalangan pemuda.
- Terlaksananya kegiatan wawasan kebangsaan dengan hasil kegiatan pemahaman kepada generasi muda tentang wawasan kebangsaan tercipta kesadaran belanegara dalam kehidupan sehari-hari.

Realisasi Anggaran setelah P-APBD :

<i>Pagu APBD</i>	<i>Pagu P-APBD</i>	<i>Realisasi Keuangan</i>	<i>Realisasi Keuangan (%)</i>	<i>Sisa Anggaran</i>
1	2	3	4	4 = (2 – 3)
203.558.000	203.558.000	20.771.300	10,20	182.786.700

- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk seminar diantaranya :

- Terlaksananya Kegiatan Seminar Peningkatan Rasa Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama dengan tema moderasi beragama sebagai upaya meningkatkan kerukunan antar umat beragama di kabupaten Bojonegoro.

Realisasi Anggaran setelah P-APBD :

<i>Pagu APBD</i>	<i>Pagu P-APBD</i>	<i>Realisasi Keuangan</i>	<i>Realisasi Keuangan (%)</i>	<i>Sisa Anggaran</i>
1	2	3	4	4 = (2 – 3)
79.302.000	79.302.000	28.777.800	36,29	50.524.200

- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Danfasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk seminar, rapat koordinasi, sarasehan, diantaranya :

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- Terlaksananya sosialisasi pemantauan keberadaan orang asing di daerah

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Kabupaten Bojonegoro
- Terlaksananya Dialog Kewaspadaan Dini
- Terlaksananya kegiatan sarasehan penanganan potensi konflik dan kerawanan social
- Terlaksananya kegiatan seminar penanggulangan potensi konflik dan kerawanan sosial.

Realisasi Anggaran setelah P-APBD :

<i>Pagu APBD</i>	<i>Pagu P-APBD</i>	<i>Realisasi Keuangan</i>	<i>Realisasi Keuangan (%)</i>	<i>Sisa Anggaran</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4 = (2 – 3)</i>
732.739.300	732.739.300	667.652.570	91,12	65.086.730

Sedangkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 2.4., 2.5., dan 2.6. berikut :

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

Nama PD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	0	100 %	100 %	100	100%	100%	100
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	21 dok	0	7 dok	7 dok	100	7 dok	14 dok	67
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Keuangan Perangkat Daerah	3 Layanan	0	1 Layanan	1 Layanan	100	1 layanan	2 layanan	67
8.01.01.2.05	Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	12 Layanan	0	4 Layanan	4 Layanan	100	4 layanan	8 layanan	67

		Daerah								
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	39 Layanan	0	13 Layanan	13 Layanan	100	13 Layanan	26 layanan	67
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	23 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100	5 unit	10 unit	43
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	9 Jenis	0	3 Jenis	3 Jenis	100	3 jenis	6 jenis	67
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	15 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100	5 unit	10 unit	67
8.01.02	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	90%	0	90%	90%	100	90%	90%	100
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	225 Orang	0	225 Orang	192 Orang	85,33	225 orang	225 orang	100
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK	Prosentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	90%	0	90%	90%	100	90%	90%	100

	DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase partai politik yang menjalankan pendidikan politik sesuai rencana	90%	0	90%	90%	100	90%	90%	100
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas yang memiliki legalitas hukum serta Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	90%	0	90%	89%	98,89	90%	90%	100
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang memiliki legalitas hukum	164 Ormas	0	114 Ormas	138 Ormas	121,05	114 Ormas	114 Ormas	100
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan Pengembangan Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	80%	0	80%	36%	45	80%	80%	100
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	225 Org	0	225 Org	60 orang	26,67	225 Org	225 Org	100

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah potensi konflik yang terdeteksi/ditemukan	21 potensi konflik	0	7 potensi konflik	8 potensi	114,29	7 potensi konflik	15 potensi konflik	71
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan teknis untuk kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik yang disusun	33 Lap	0	11 Lap	11 Laporan	100	11 Lap	22 lap	67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja Pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- ✓ Meningkatnya kesadaran dan pemahaman elemen masyarakat masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan demokrasi;
- ✓ Meningkatkan kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro meliputi analisis unsur internal dan analisis unsur eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Unsur Internal.

a. Kekuatan (*Strength*):

- Intensitas pembinaan Wawasan Kebangsaan;
- Cakupan peserta pembinaan Wawasan Kebangsaan;
- Kompetensi narasumber;
- Koordinasi antar instansi terkait;
- Intensitas pembinaan pada masyarakat dan partai politik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan pada masyarakat dan anggota partai politik;
- Fasilitasi pada partai politik.

b. Kelemahan (*Weakness*):

- Belum maksimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- Sumber daya manusia yang belum optimal;
- Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro kurang di kenal masyarakat;
- Koordinasi yang kurang maksimal antar lembaga/dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2. Unsur Eksternal (*Menggunakan Balance Scorecard*)

a. Peluang (*Opportunity*)

- Adanya jarak antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu;
- Munculnya sifat individualis pada masyarakat;
- Kehidupan yang makin berat dan kompleks tingkat pendidikan masyarakat;
- Kondisi politik yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik;
- Sikap apatis masyarakat;
- Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya.

b. Ancaman (*Threats*):

Masih terjadinya konflik kemasyarakatan seperti konflik antar umat beragama yang kadang masih terjadi di masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro yaitu :

Tugas pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro. Adapun analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Pada Tahun
					2021	2021	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indikator Sasaran : Prosentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik				70%	100%	142,86%
	Indikator Sasaran : Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi elemen masyarakat				72%	89,13%	123,79%
	Indikator Sasaran : Prosentase tingkat Penanganan Konflik/Masalah				80%	100%	125,00%
1.	Indikator Program : Prosentase Kesadaran masyarakat tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama				90%	90%	100%
1.	Indikator Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				225 Org	192Org	85,33%
1.	Indikator Program : Prosentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik				90%	90%	100%
1.	Indikator Kegiatan : Prosentase partai politik/lembaga yang menjalankan pendidikan politik sesuai rencana				90%	90%	100%
1.	Indikator Program : Prosentase Ormas yang memiliki legalitas hukum serta Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan				90%	89%	98,89

1.	Indikator Kegiatan : Jumlah ormas yang memiliki legalitas hukum				114 Ormas	138 Ormas	121,05%
1.	Indikator Program : Prosentase tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan Pengembangan Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama				80%	36%	45%
1.	Indikator Kegiatan : Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan				225 Org	60 Org	26,67%
1.	Indikator Program : Jumlah potensi konflik yang terdeteksi/ditemukan				7 potensi	8 Potensi	114,29%
2.	Indikator Kegiatan : Jumlah kebijakan teknis untuk kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik yang disusun				11 Lap	11 Lap	100%

Dari tabel diatas, dapat dianalisa bahwa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro menunjukkan **kinerja sangat baik**. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut antara lain adanya komitmen antar pemangku kepentingan dan dukungan stakeholder yang kuat serta anggaran yang memadai dan aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian indikator kinerja layanan. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target terhitung kecil. Dari hasil tersebut, dapat digunakan sebagai acuan dan penentuan arah kedepannya guna peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro sehingga tahun kedepan yang akan ditentukan dapat tercapai, dengan demikian kualitas dan konsistensi perencanaan dapat diwujudkan.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Pada Tahun
					2022	2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indikator Sasaran : Prosentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik				77%	100%	129,87%
	Indikator Sasaran : Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi elemen masyarakat				78%	90%	115,38%
	Indikator Sasaran : Prosentase tingkat Penanganan Konflik/Masalah				85%	100%	117,65%
1.	Indikator Program : Prosentase Kesadaran masyarakat tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama				90%	90%	100%
1.	Indikator Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				225Org	192 Org	85,33%
1.	Indikator Program : Prosentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik				90%	92%	102,2%
1.	Indikator Kegiatan : Prosentase partai politik/lembaga yang menjalankan pendidikan politik sesuai rencana				90%	90%	100%
1.	Indikator Program : Prosentase Ormas yang memiliki legalitas hukum serta Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan				90%	97%	107,7%

1.	Indikator Kegiatan : Jumlah ormas yang memiliki legalitas hukum				139Ormas	145Ormas	104,3%
1.	Indikator Program : Prosentase tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan Pengembangan Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama				80%	70%	87,50%
1.	Indikator Kegiatan : Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan				100%	70%	70%
1.	Indikator Program : Jumlah potensi konflik yang terdeteksi/ditemukan				7 Potensi	9 Potensi	112,5%
2.	Indikator Kegiatan : Jumlah kebijakan teknis untuk kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik yang disusun				11 Lap	11 Lap	100%

Dari tabel diatas, dapat dianalisa bahwa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro menunjukkan **kinerja sangat baik**. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut antara lain adanya komitmen antar pemangku kepentingan dan dukungan stakeholder yang kuat serta anggaran yang memadai dan aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian indikator kinerja layanan. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target terhitung kecil. Dari hasil tersebut, dapat digunakan sebagai acuan dan penentuan arah kedepannya guna peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro sehingga tahun kedepan yang akan ditentukan dapat tercapai, dengan demikian kualitas dan konsistensi perencanaan dapat diwujudkan.

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Kurangnya fasilitasi dalam menciptakan kerukunan di dalam masyarakat yang heterogeny berpotensi menimbulkan gangguan pada persatuan dan kesatuan bangsa;
- 2) Kurangnya fasilitasi kehidupan berpolitik sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan konflik vertikal;
- 3) Kurangnya fasilitasi terhadap Ormas / LSM / organisasi lainnya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dalam masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b) Program prioritas pembangunan daerah dan;
- c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro berdasarkan RKPD Kabupaten Bojonegoro sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 2.7

Review Terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

No	Perubahan RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bojonegoro	Rata-rata capaian kegiatan	100%	5.184.798.134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bojonegoro	Rata-rata capaian kegiatan	100%	5.184.798.134	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	2 Dokumen	80.385.000	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	2 Dokumen	80.385.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah Layanan Keuangan Perangkat Daerah	1 layanan	4.240.969.186	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah Layanan Keuangan Perangkat Daerah	1 layanan	4.240.969.186	
3	Kepegawaian Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 layanan	3.396.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 layanan	3.396.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah Layanan Administrasi Umum	13 layanan	221.378.400	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Bojonegoro	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	13 layanan	221.378.400	

			Perangkat Daerah			Daerah					
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	9 unit	77.925.100	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	9 unit	77.925.100	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	3 jenis	415.702.448	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	3 jenis	415.702.448	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	5 unit	145.042.000	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	5 unit	145.042.000	
II	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bojonegoro	Prosentase Kesadaran masyarakat tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	91%	1.336.533.800	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bojonegoro	Prosentase Kesadaran masyarakat tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	90%	1.336.533.800	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bojonegoro	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	225 orang	1.336.534.048	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bojonegoro	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	200 orang	1.336.534.048	
III	PROGRAM	Bojonegoro	Prosentase pemilih pemula	93%	72.574.052.279	PROGRAM	Bojonegoro	Prosentase pemilih pemula	90%	72.574.052.27	

	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	goro	yang mendapatkan pendidikan politik			PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	goro	yang mendapatkan pendidikan politik		9	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bojone goro	Jumlah parpol yang difasilitasi dalam menyusun program kerja	91%	72.574.052.279	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bojone goro	Jumlah parpol yang difasilitasi dalam menyusun program kerja	90%	72.574.052.279	
IV	PROGRAM	Bojone	Prosentase Ormas yang	90%	968.499.780	PROGRAM	Bojone	Prosentase Ormas yang	90%	968.499.780	

	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	goro	memiliki legalitas hukum serta Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan			PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	goro	memiliki legalitas hukum serta Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan			
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bojone goro	Jumlah ormas yang memiliki legalitas hukum	164 ormas	968.499.780	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bojone goro	Jumlah ormas yang memiliki legalitas hukum	164 ormas	968.499.780	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bojone goro	Persentase Pembinaan dan Pengembangan masyarakat tentang HAM	80%	304.733.835	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bojone goro	Persentase Pembinaan dan Pengembangan masyarakat tentang HAM	80%	304.733.835	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bojone goro	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	200 orang	304.733.835	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bojone goro	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	200 orang	304.733.835	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	Bojone goro	Jumlah potensi konflik yang terdeteksi/ditemukan	7 potensi	816.122.265	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	Bojone goro	Jumlah potensi konflik yang terdeteksi/ditemukan	7 potensi	816.122.265	

	NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DANFASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DANFASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bojone goro	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ koordinasi	11 lap	816.122.265	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bojone goro	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ koordinasi	11 lap	816.122.265	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi.

Adapun telaahan terhadap kebijakan nasional pada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sebagai berikut ;

1. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.
2. Membangun hubungan positif konstruktif antar lembaga infra dan supra struktur politik, pemerintah dan masyarakat dalam berdemokrasi melalui fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif.
3. Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting Kewaspadaan Nasional kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI.
4. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat disegala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Meningkatkan pemahaman HAM di jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategi pemecahan masalah guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan Evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Review Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal		Indeks Toleransi Sosial (ITS)	B (73,00)
		Meningkatnya sinergitas dengan ormas, LSM, dan instansi pemerintah	persentase ormas dan LSM yang aktif dan terdaftar sesuai ketentuan	91%
		Meningkatnya kewaspadaan dan cegah dini konflik sosial	Persentase tingkat efektifitas deteksi dini	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 mencakup 1 (satu) urusan, 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
meliputi:

1)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Awal Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan :
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, meliputi kegiatan :

2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri atas sub kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3)PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, meliputi kegiatan:

3.1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, terdiri atas sub kegiatan:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan

Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

- c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, meliputi kegiatan :

- 4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan

**5)PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA,** meliputi kegiatan :

- 5.1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, terdiri sub kegiatan :
- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

**6)PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL,** meliputi kegiatan :

- 1.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, terdiri atas sub kegiatan :
- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

- Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

Dari program dan kegiatan tersebut diatas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro mendukung misi ke-1 pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023, yaitu ***“Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal”*** yang bermakna pemerintah dan masyarakat menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam koridor falsafah Negara Pancasila.

Rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Bojonegoro pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Bojonegoro secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bojonegoro

Nama PD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				82.559.395.913				15.962.436.321
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kegiatan	Bojonegoro	100%	5.184.798.134			100%	5,813,537,110
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Bojonegoro	2 Dokumen	80.385.000			2 Dokumen	31.706.000
8 0 0 2.01 0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bojonegoro	2 Dokumen	4.465.000	Dana DBH Pajak		2 Dokumen	4.465.000
8 01 0 2.01 0 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Bojonegoro	1 Dokumen	4.250.000	Dana DBH Pajak		1 Dokumen	4.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen RKA-SKPD							
8 0 0 2.01 0 1 1 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bojonegoro	1 Dokumen	3.250.000	Dana DBH Pajak		1 Dokumen	3.250.000
8 0 0 2.01 0 1 1 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bojonegoro	1 Dokumen	4.730.000	Dana DBH Pajak		1 Dokumen	4.730.000
8 0 0 2.01 0 1 1 1 5	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bojonegoro	1 Dokumen	3.970.000	Dana DBH Pajak		1 Dokumen	3.970.000
8 0 0 2.01 0 1 1 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bojonegoro	3 Laporan	3.901.000	Dana DBH Pajak		3 Laporan	3.901.000
8 0 0 2.01 0 1 1 1 7	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bojonegoro	2 Laporan	55.819.000	Dana DBH Pajak		2 Laporan	7.140.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 0 0 2.02 1 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Bojonegoro	1 layanan	4.240.969.186			1 layanan	4.366.315.189
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bojonegoro	25 Orang/bulan	4.010.361.786	Dana DAU		25 Orang/bulan	4.101.886.699
8 01 01 2.02 02	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bojonegoro	28 Dokumen	2.954.800	Dana DBH Pajak		28 Dokumen	2.954.990
8 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bojonegoro	12 Dokumen	222.310.000	Dana DBH Pajak		12 Dokumen	256.130.000
8 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bojonegoro	4 Dokumen	1.499.100	Dana DBH Pajak		4 Dokumen	1.500.000
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Awal TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Awal Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Awal Tahun SKPD	Bojonegoro	3 Laporan	1.611.500	Dana DBH Pajak		3 Laporan	1.611.500
8 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bojonegoro	2 Dokumen	430.500	Dana DBH Pajak		2 Dokumen	430.500
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bojonegoro	12 Laporan	1.253.000	Dana DBH Pajak		12 Laporan	1.253.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporandan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bojonegoro	2 Dokumen	548.500	Dana DBH Pajak		2 Dokumen	548.500
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bojonegoro	4 layanan	3.396.000			4 layanan	3.396.000
8 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bojonegoro	28 Dokumen	3.396.000	Dana DBH Pajak		28 Dokumen	3.396.000
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bojonegoro	13 layanan	221.378.400			13 layanan	237.387.550
8 01 01 2.06 01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bojonegoro	1 Paket	2.500.000	Dana DBH Pajak		1 Paket	2.500.000
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bojonegoro	4 Paket	37.096.000	Dana DBH Pajak		4 Paket	25.028.000
8 01 01 2.06 03	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bojonegoro	1 Paket	20.328.000	Dana DBH Pajak		1 Paket	15.250.000
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bojonegoro	4 Paket	50.189.400	Dana DBH Pajak		4 Paket	62.214.950
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan	Bojonegoro	2 Paket	31.077.000	Dana DBH Pajak		2 Paket	43.819.100
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bojonegoro	12 Dokumen	3.000.000	Dana DBH Pajak		12 Dokumen	3.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bojonegoro	5 Laporan	4.700.000	Dana DBH Pajak		5 Laporan	4.700.000
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bojonegoro	10 Laporan	72.488.000	Dana DBH Pajak		8 Laporan	80.875.500
8 0 0 2.0 1 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Bojonegoro	9 unit	77.925.100			9 unit	36.023.500
8 01 0 2.07 05 1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bojonegoro	1 Unit	5.539.200	Dana DBH Pajak		2 Unit	10.350.000
8 01 0 2.07 06 1	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bojonegoro	1 Unit	72.385.900	Dana DBH Pajak		2 Unit	25.673.500
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Bojonegoro	3 jenis	415.702.448			3 jenis	404.002.632
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bojonegoro	12 Laporan	3.000.000	Dana DBH Pajak		6 Laporan	1.000.000
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bojonegoro	36 Laporan	103.040.000	Dana DBH Pajak		36 Laporan	99.095.000
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bojonegoro	12 Laporan	309.662.448	Dana DBH Pajak		12 Laporan	303.907.632
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Bojonegoro	5 unit	145.042.000			5 unit	150.071.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Daerah								
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bojonegoro	21 Unit	117.040.000	Dana DBH Pajak		21 Unit	125.665.900
8 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Bojonegoro	7 unit	3.412.000	Dana DBH Pajak		7 unit	3.436.000
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Bojonegoro	21 unit	14.730.000	Dana DBH Pajak		21 unit	20.970.000
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bojonegoro	1 unit	9.860.000	Dana DBH Pajak		0 unit	-
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Kesadaran masyarakat tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Bojonegoro	90%	1.336.533.800			90%	1.356.360.750
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bojonegoro	200 orang	1.336.533.800			200 orang	1.356.360.750
8 01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerjadi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Bojonegoro	3 Dokumen	6.180.000	Dana DBH Pajak		3 Dokumen	6.180.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Bojonegoro	3 Dokumen	9.456.000	Dana DBH Pajak		3 Dokumen	9.456.000
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bojonegoro	200 Orang	1.297.966.800	Dana DBH Pajak		200 Orang	1.317.793.750
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bojonegoro	15 Orang	17.281.000	Dana DBH Pajak		15 Orang	17.281.000
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan HasilMonitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bojonegoro	5 Laporan	5.650.000	Dana DBH Pajak		5 Laporan	5.650.000
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	Prosentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	Bojonegoro	90%	72.574.052.279			90%	8.237.092.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BUDAYAPOLITIK								
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase partai politik/lembaga yang menjalankan pendidikan politik sesuai rencana	Bojonegoro	90%	72.574.052.279			90%	8.237.092.500
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerjadi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Bojonegoro	2 Dokumen	16.420.000	Dana DBH Pajak		2 Dokumen	12.360.000
8 01 03 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi PolitikDi Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Bojonegoro	2 Dokumen	4.313.500	Dana DBH Pajak		2 Dokumen	4.063.500
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Bojonegoro	150 Orang	72.282.751.154	Dana DBH Pajak		150 Orang	7.985.597.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi PolitikDi Daerah	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi DiBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politikdi Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bojonegoro	400 Orang	227.959.000	Dana DBH Pajak		400 Orang	222.716.500
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politikdi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bojonegoro	20 Laporan	42.608.625	Dana DBH Pajak		20 Laporan	12.355.000
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas yang memiliki legalitas hukum serta Pemberdayaan Organisasi Kemayarakatan	Bojonegoro	90%	1.943.156.000			90%	328.039.000
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah ormas yang memiliki legalitas	Bojonegor	164 ormas	1.943.156.000			164 ormas	328.039.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	hukum	o						
8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerjadibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Bojonegoro	2 Dokumen	14.547.000	Dana DBH Pajak		2 Dokumen	14.547.000
8 01 04 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Bojonegoro	2 Dokumen	28.855.000	Dana DBH Pajak		2 Dokumen	28.855.000
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bojonegoro	10 Orang	1.743.740.600	Dana DBH Pajak		10 Orang	115.868.000
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bojonegoro	300 Orang	142.624.400	Dana DBH Pajak		300 Orang	155.380.000
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Bojonegoro	3 Laporan	13.389.000	Dana DBH Pajak		3 Laporan	13.389.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan Pengembangan Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Bojonegoro	80%	704.733.800			80%	79.302.000
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	Bojonegoro	200 orang	704.733.800			100 orang	79.302.000
8 01 05 2.01 01	Penyusunan Program Kerjadi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat, Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Bojonegoro	1 Dokumen	6.600.000	Dana DBH Pajak		1 Dokumen	6.600.000
8 01 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Bojonegoro	2 Dokumen	5.256.000	Dana DBH Pajak		2 Dokumen	5.256.000
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Bojonegoro	200 Orang	668.936.800	Dana DBH Pajak		100 Orang	43.505.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bojonegoro	6 Orang	13.647.000	Dana DBH Pajak		6 Orang	13.647.000
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bojonegoro	2 Laporan	10.294.000	Dana DBH Pajak		2 Laporan	10.294.000
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah potensi konflik yang terdeteksi/ditemukan	Bojonegoro	7 potensi	816.121.900	Dana DBH Pajak dan Pajak Rokok		7 potensi	732.739.300
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan teknis untuk kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik yang disusun	Bojonegoro	11 lap	816.121.900	Dana DBH Pajak dan Pajak Rokok		11 lap	732.739.300
8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Bojonegoro	3 Dokumen	20.958.500			3 Dokumen	16.100.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun							
8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Bojonegoro	5 Dokumen	121.123.100			5 Dokumen	131.178.000
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Bojonegoro	160 Orang	282.581.400			160 Orang	61.770.000
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Bojonegoro	64 Orang	78.622.800			64 Orang	82.675.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penanganan Konflik di Daerah	di Daerah							
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bojonegoro	120 Laporan	61.417.000			120 Laporan	72.966.000
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	5 Dokumen	251.419.100			5 Dokumen	368.050.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025, RPJM Provinsi Jawa Timur, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Awalnya dengan segala kemampuan yang ada, kami bertekad untuk mewujudkan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini sebagai sumbangsih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro pada umumnya.

Bojonegoro, 22 Juli 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOJONEGORO**



MAHMUDI S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690622 199003 1 006